

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menarik yang ingin penulis kaji mengenai perjuangan gerakan Ikhwanul Muslimin (yang selanjutnya kita sebut dengan "IM") dalam melawan otoritarianisme di Mesir. Pertama, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi yang menginisiasi lahirnya gerakan kebangkitan Islam pada abad 20. Di saat gerakan kebangkitan Islam ini harus berjuang membersihkan masyarakat dari keruntuhan-keruntuhan moral masyarakat dunia, IM juga harus berjuang melawan rezim otoriter yang berkuasa, penyiksaan terhadap anggota IM menjadi sisi lain dibalik eksistensinya. Tentunya bagi penulis, ini adalah tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi sebuah gerakan, yang menurut penulis ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penulis memilih perjuangan IM melawan pemerintahan pada masa Gamal Abdul Nasser karena masa ini merupakan masa-masa awal perjuangan IM, yang setelah kooperatif dengan Gamal Abdul Nasser, bersama-sama menumbangkan Raja Farouk kemudian menjadi organisasi terlarang pada pemerintahan Gamal Abdul Nasser pula. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kontradiksi inilah yang mengharuskan adanya fakta-fakta sejarah dalam menjawab pertanyaan yang ada.

Kedua, penulis memilih untuk membandingkannya dengan pemerintahan Husni Mubarak karena rezim ini adalah rezim terakhir sebelum IM menguasai

pemerintahan. Pada rezim Husni Mubarak, IM mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam Majelis Rendah, dan untuk kali pertama anggota IM berada dalam parlemen Mesir, walau tanpa lambang dan tanpa simbolisasi IM. Hal ini menjadi menarik jika dilihat bagaimana peranan perjuangan IM di masa ini.

Ketiga, IM adalah organisasi masyarakat yang lahir di Mesir. Saat ini namanya tidak asing lagi di telinga. Pemikiran organisasi ini telah diadopsi banyak tokoh politik di dunia, sebut saja Erdogan, Perdana Menteri Turki, yang merupakan anggota dari *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan, yang disebut-sebut sebagai partai berbasis IM. Selain tokoh, banyak organisasi besar bermunculan tidak terlepas dari perjalanan IM dalam mewarnai pemikiran masyarakat Mesir yang kemudian taktik dan strategi serta sistem pegkaderannya banyak diadopsi organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan, seperti PKS di Indonesia, FIS di Aljazair, ataupun PAS di Malaysia. Organisasi-organisasi ini memadukan antara wilayah agama dan negara untuk tidak dipisahkan dalam pelaksanaannya. Inilah yang menjadi ciri khas yang tidak terlepas dari pergerakan IM, menyatukan antara konsep Islam dan negara (*din wa daulah*).

Pemikiran ini pula yang menjadi salah satu akar permasalahan retaknya hubungan antara IM dan rezim Gamal Abdul Naseer. Dalam khusus ini, IM secara terang-terangan menolak konsep ideologi sekuler yang dianut oleh pemerintahan pada masa itu.

Strategi dan pemikiran politik IM yang banyak dijadikan panutan bagi banyak tokoh dan organisasi di dunia menjadi menarik untuk dibahas. Kemunculannya sebagai organisasi muda yang sudah menjadi organisasi terlarang di Mesir, membentuk strategi dan pemikiran politik IM sangat militan dalam memperjuangkan ideologinya.

Itulah berbagai penyebab alasan penulis akhirnya ingin mengkaji lebih lanjut mengenai strategi politik Ikhwanul Muslimin. Perjuangan yang cukup dramatis sampai akhirnya dukungan dan pujian pun datang tidak ubahnya seperti hujan dan makian, gerakan besar yang lahir atas nama perjuangan.

B. Latar Belakang Masalah

Dunia Arab bergejolak, diawali pada akhir tahun 2010, dunia digemparkan dengan kabar seputar gejolak di Tunisia. Warga Tunisia mengancam dan menuntut presidennya, Zine El Abidine Ben Ali untuk turun dari jabatannya. Sampai pada Januari 2011 digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Revolusi yang terjadi di Tunisia tampaknya menjadi uap panas yang kemudian menyebar ke negara-negara Arab yang lain. Salah satunya adalah Mesir, negara yang terkenal dengan peradaban kunonya itu.

Mesir bergejolak setelah revolusi disusul oleh tumbangya rezim Husni Mubarak. Pada tanggal 23 Mei 2012, untuk pertama kalinya warga Mesir berpartisipasi dalam pemilihan umum guna menentukan pemimpin tertinggi

negara Spinx tersebut. Tercatat sekitar 50 juta warga mesir memberikan suaranya dalam pemilihan umum ini.¹

IM selalu memiliki penyesuaian-penyesuaian strategi untuk menghadapi rezim yang sedang berkuasa. Pada masa rezim monarki Raja Farouk, IM bekerjasama dengan militer yang dipimpin Gamal Abdul Naseer menumbangkan rezim tersebut. Awalnya, IM dengan Gamal Abdul Naseer membentuk kerjasama militer untuk melakukan kudeta terhadap Raja Farouk. Kerjasama ini didasarkan pada kepentingan politik bersama untuk menggantikan pemerintahan absolut yang cenderung selalu berpihak pada Barat, menghapuskannya dan menggantinya dengan sistem demokrasi presidensial. Terjadilah revolusi Mesir 1952 yang berhasil menggulingkan Raja Farouk yang akhirnya melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka politik.

Sistem Monarki Absolut akhirnya berganti dengan sisem Demokrasi Presidensial. Naseer kemudian menawarkan koalisi dengan IM. Namun, ternyata IM tidak puas dengan pemerintahan Naseer yang otoriter serta adanya kontrol perwira terhadap beberapa lembaga seperti pers, kehakiman, kepolisian dan partai politik. Terjadi perbedaan pandangan antara IM dan Nasser. IM menuntut untuk ikut campur dalam maslah politik nasional, kemudian Nasser pun mengambil langkah-langkah politik untuk menekan IM.

Melalui Dewan Pembebasan, Nasser menggalang dukungan rakyat untuk mendukung negara yang berdasar nasionalisme dan sosialisme Arab sekuler, serta

¹ *Mohammed Mursi Presiden Terpilih*, (diunduh pada 25 Juli 2013); dari <http://www.suaranembaruan.com/home/mohammed-mursi-presiden-mesir-terpilih/21636>

mengutuk slogan-slogan selain nasionalisme. Nasser juga menekan IM untuk tidak menyebar luaskan ideologi Islamis.

Nasser tidak tinggal diam, IM terus dikecam untuk tidak melakukan aktivitasnya yang dianggap dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Propaganda-propaganda Nasser cukup membuat rakyat terpengaruh dan membenci IM. Bahkan masyarakat yang marah secara brutal membakar kantor IM di Kairo.

Nasser bertindak tegas untuk menumpas IM sampai akar-akarnya. Diawali pada 30 Oktober 1954, Nasser menangkap Mursyid Am (Pemimpin Umum Ikhwan) kedua, Hasan Al Hudhaibi, dengan tuduhan tindakan subversif yang membahayakan keamanan negara.² Nasser menuduh IM akan melakukan gerakan revolusioner, penentangan terhadap negara dengan ditemukannya gudang senjata di salah satu rumah anggota IM. Nasser menangkap dan juga menahan ribuan anggota IM. Nasser melalui militernya juga mencari anggota IM yang belum tertangkap sampai mereka lari dan bersembunyi di pengasingan. Pada masa ini sering terjadi peperangan sporadis antara pemerintahan Nasser dan IM. Nasser pun menyatakan bahwa IM adalah organisasi yang terlarang di Mesir.

Kerasnya tekanan dari pemerintah Nasser membuat IM semakin terdesak. Banyak tokoh-tokoh IM yang dimasukkan ke dalam penjara, seperti Sayid Qutbh, Al Ghazali, Ahmad Abdul Hamid, Yusuf Qardhawi dan banyak anggota IM yang lain.³ Penjara dijadikan tempat konsolidasi dan peningkatan rukhiyah para

² Richard Paul Mithcell, *Masyarakat Al-Ikhwan Al-Muslimun : Gerakan Dakwah Al-Ikhwan Di Mata Cendekiawan Barat*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hal 146

³ M. S. Q. "The Ikhwan Al-Muslimun in Egypt" (London: Al-Farooq, 2002), hal 146

anggota IM, sebelum masing-masing dari mereka dijatuhi hukuman. Besarnya tekanan dari rezim Nasser tidak menyurutkan semangat IM. IM terus bergerak maju untuk memperjuangkan kepentingannya.

Pada tahun 1970, Nasser meninggal, kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Anwar Sadat, IM mulai diberikan kelonggaran. Sadat memahami benar kekuatan besar IM, yang akan diperlukannya untuk mendukung pemerintahannya, sehingga Sadat tidak terlalu menekan IM. Ini merupakan taktik yang dipilih Sadat dalam menangani IM. Namun, walau begitu IM tidak diperbolehkan untuk masuk dalam wilayah-wilayah politik praktis.

Pemulihan hubungan juga dilakukan pada pemerintahan Husni Mubarak. Kekuatan yang besar dari IM, membuat Mubarak sadar untuk menggalang dukungan dari organisasi masa ini.

Pada masa pemerintahannya, Mubarak memberikan kesempatan kepada kubu Islamis untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan dewan eksekutif, asosiasi bersama melawan kandidat dari pemerintah dan kandidat oposisi sekuler. Sikap kooperatif yang diunjukkan Mubarak memungkinkan seluruh lapisan kaum Islamis baik yang berhaluan fundamentalis maupun moderat untuk melakukan partisipasi politik dan ini bertujuan untuk mempertahankan monopoli kekuasaan di tangannya.⁴

⁴ Adhe Nuansa Wibisono, *Perjuangan Politik Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam Melawan Rezim Otoritarianisme di Mesir Pada Era Gamal Abdul Nasser sampai Husni Mubarak (1954-2011)*, (skripsi, Universitas Gajah Mada, 2011)

Pemerintahan Mubarak memberika kebebasan anggota IM untuk ikut dalam politik praktis, namun tidak dengan partainya sendiri, atau dengan kata lain IM harus berkoalisi dengan partai lain. Walaupun begitu, Mubarak tidak memberikan status légal pada organisasi tersebut. Mubarak pun melarang penerbitan majalah IM yakni *Ad Da'wa*.

Sikap kooperatif Mubarak tidak berlangsung lama. Mengetahui pengaruh IM sudah meluas, Mubarak segera membekukan asosiasi-asosiasi profesional yang digawangi oleh IM. Mubarak juga menangkap dan memenjarakan puluhan ribu kader IM.

Pada tanggal 25 Januari 2011, puluhan ribu rakyat Mesir berkumpul di Tahrir Square berdemonstrasi untuk menuntut Husni Mubarak turun dari kursi kepresidenan. Hari ini yang kemudian dikenal dengan Revolusi Mesir 2011. Hari ini menjadi momentum yang berharga bagi IM untuk ikut berpartisipasi dalam politik Mesir. Jatuhnya rezim Mubarak menjadi angin segar bagi IM untuk terjun ke ranah politik praktis dengan lebih leluasa.

Setiap rezim yang berkuasa di Mesir selalu bertentangan dengan IM. Rezim-rezim tersebut selalu menganggap IM sebagai ancaman yang dapat mengancam pemerintahan. Itulah mengapa di setiap rezim selalu ada profokasi-profokasi untuk membubarkan IM, memberi ancaman terhadap anggota-anggotanya, bahkan melalui acaman fisik. Namun, walaupun begitu eksistensi IM masih bisa dirasakan sampai mau menguasai perancangan politik Mesir

C. Rumusan Masalah

Proses perjuangan politik yang telah dilakukan IM dalam melawan rezim otoritarianisme pada masa Nasser dan Mubarak akan dibandingkan dalam penelitian ini. Sehingga, dapat ditarik pertanyaan; **Bagaimana perbandingan strategi politik IM di masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser dan di masa Husni Mubarak?**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penelitian ini yakni:

1. Memahami dan mengetahui arah gerak serta landasan dasar yang menginspirasi Ikhwanul Muslimin untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan.
2. Mengetahui alur historik perjuangannya di Mesir menghadapi tindakan represif pemerintahan pada masa Gamal Abdul Nasser.
3. Mengetahui kondisi politik Mesir ketika rezim Husni Mubarak, sehingga mempengaruhi tumbanganya diktator tersebut.
4. Memahami strategi-strategi yang digunakan IM pada masa Husni

E. Kerangka Dasar Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa konsep dengan menggunakan analisis dalam ilmu sosial. Beberapa konsep tersebut adalah :

1. Konsep Gerakan Sosial Keagamaan

Ikhwaniul Muslimin adalah sebuah gerakan sosial keagamaan. Menurut Eric Hoffer organisasi sosial dicirikan dengan adanya kerelaan anggotanya untuk berkorban sampai mati, kecenderungan aksi yang solid dan kesetiaan tunggal.⁵ Hoffer juga menyebutkan gerakan sosial ini digerakkan oleh *the true believers* yakni kaum yang frustrasi, tidak puas dan kecewa serta tersingkir dalam kehidupan di tengah masyarakat hingga kelompok minoritas yang tertekan.

Sedangkan, menurut Stephen K. Enderson, gerakan sosial keagamaan disebut juga dengan gerakan revitalisasi atau *millenarian* (seribu tahun) yakni suatu upaya untuk menciptakan eksistensi baru yang disesuaikan dengan kondisi sekarang yang lebih baik dalam masa seribu tahun.⁶ *Millenarian* ini diartikan suatu masa yang damai, harmoni, dan makmur, ketika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kharismatik yang dipandang sebagai mesias.

Gerakan *millenarian* mengandung unsur keagamaan dan unsur politik yang ada dalam ideologi dan strateginya untuk melakukan perubahan atas *role* yang mereka tolak. Gerakan ini muncul karena adanya kondisi-kondisi

⁵ Eric Hoffer, *Gerakan Massa*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hal 25

⁶ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal 532

ketegangan atau krisis sosial yang ekstrim. Seperti ketika kebudayaan pribumi diubah oleh kolonialisme, perang, atau invansi kebudayaan asing, atau ketika penindasan dan eksploitasi sudah melampaui batas dan tidak dapat ditolelir.

Masyarakat muslim yang mengalami penindasan akibat kolonialisasi menimbulkan adanya perlawanan-perlawanan. Perlawanan terhadap krisis sosial yang ekstrim ini memberikan semangat untuk bekerja sama membentuk sebuah gerakan. Semangat revivalisme dan purifikasi memberikan warna bagi gerakan keagamaan ini untuk menjawab semua persoalan yang mereka hadapi.

Gerakan *millenerian* memiliki jenis yang berbeda-beda, ada yang sangat politis dan radikal, yang mengharapkan dilakukannya perubahan sosial dengan segera. Ada pula yang lebih terarah kepada tujuan religius.

Menurut Kalim Siddiqui idealnya gerakan Islam seharusnya menjadi sistem tingkah laku yang merespon input informasi dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Gerakan Islam adalah suatu sistem yang mendunia, terbuka dan tersebar, dimana muslim secara individual dan kolektif yang terorganisir, secara sadar bekerja untuk mengkonsolidasikan kembali *ummah* ke dalam sebuah behavioral, operasional dan kreatif mengejar tujuan yang telah dicita-citakan. Kalim memetakan dengan dasar :⁷

- 1) Sistem Ultra Stabil, yakni gerakan Islam tidak akan bisa dihancurkan secara keseluruhan. Dalam arti walaupun ada musuh yang

⁷ Kalim Siddiqui, *In Pursuit of the Power of Islam*, telah diterjemahkan pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002, dikutip dari Skripsi M. Muharram Lubis "Aktivitas Gerakan Transnasional Tarbiyah pada Transformasi Sosial Politik Indonesia Pasca Orde Baru"

menghancurkan hanya sub-sistem saja sekalipun itu yang utama, gerakan Islam tidak akan menghancurkan keseluruhan.

- 2) Sistem Behavioral, di mana karakternya memiliki tujuan-tujuan dan norma-norma untuk mengatur dirinya sendiri (anggota) dan kemampuan untuk menahan tekanan dari lingkungannya. Sikap gerakan Islam dan para anggotanya begitu memikat sehingga kebanyakan mereka yang mengadakan kontak dengannya menerima sumber behavioralnya yaitu Islam
- 3) Sistem Koreksi-Diri, diperoleh dengan menyediakan *feedback loop* yang memungkinkan sistem kembali ke "Norma" *pre-set* ketika terkena perubahan lingkungan. *Thermo-static quality* yang akan mendistorsi fungsinya adalah sistem perilaku "kehendak". Semua gerakan Islam sebagai sistem perilaku secara kasar sama dengan situasi behavioral seperti orang tua yang tidak sanggup lagi melakukan aktivitasnya. Namun, "Norma" tetap menjaganya yang pada suatu hari akan direstorasi. "Norma" ini diabadikan dalam wahyu (Al Qur'an) sebagai sumber pengetahuan dan Sunnah Nabi sebagai metode, serta peradaban Madinah sebagai modelnya yang menjadi inspirasi dan cita-cita gerakan kontemporer.
- 4) Lingkungan Sistem. Sistem ini dihadapkan pada tiga pilihan yakni:
 - a. Mengisolasi diri dari lingkungan (di luar sistem) sehingga menjadi

- b. Mengontrol sebesar mungkin bagian lingkungan. Dalam hubungan internasional kontemporer, negara *super power* melakukan ini dengan menguasai wilayah jajahannya.
- c. Mencoba menyesuaikan tekanan lingkungan sebisa mungkin agar bisa bertahan hidup. Berusaha mengejar kebijakan luar negeri, tetapi sedikit sekali melakukan perubahan dalam lingkungan mereka.

2. Konsep Strategi Gerakan

Strategi menurut Michael Allison dan Jude Kaye adalah⁸

proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa strategi merupakan sebuah proses sistemik yang digunakan oleh organisasi untuk membangun keterlibatan antara pembuat keputusan guna mewujudkan suatu misi yang dilakukan sebagai akibat dari respon terhadap peluang maupun ancaman eksternal. Strategi politik suatu gerakan sosial berkembang sesuai dengan kultur dan kondisi sosial politik yang muncul di suatu daerah.⁹ Menurut Suharko strategi yang dipilih biasanya berdasarkan konteks atau *setting* politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang

⁸ Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal 1

⁹ Suharko, *Strategi Gerakan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal 10

dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki. Strategi politik ini sendiri terdapat beberapa variasi, yakni:¹⁰

1. *Low Profile Strategy*, menurut Fisher strategi ini merupakan strategi isolasi politik. Strategi ini digunakan khusus untuk menghadapi situasi politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian.
2. Strategi Pelapisan (*layering*), menurut Fowler strategi ini dapat dioperasikan di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan merupakan penggambungan penyediaan layanan yang bertujuan untuk menyejahterakan, namun, sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang bertujuan untuk pemberdayaan dan transformasi sosial. Tujuan dari pelapisan ini adalah menghindari diri dari intervensi langsung pihak lawan.
3. Strategi advokasi, strategi ini umumnya digunakan untuk mendesak perubahan-perubahan sosial, seperti demokratisasi. Strategi ini efektif untuk mendesak pemerintahan melakukan kebijakan-kebijakan. Seperti yang dilakukan oleh NGO memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan sesuai dengan konsentrasi organisasi tersebut.
4. Keterlibatan kritis (*critical engagement*), strategi ini merupakan strategi yang menggabungkan antara strategi advokasi dengan strategi kerjasama. Pada strategi ini, strategi untuk mendesak perubahan-perubahan sosial ditambahkan pada kerjasama terhadap pemerintah

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan orang atau sekelompok orang untuk turut serta dalam kehidupan politik secara aktif.¹¹ Bentuk dari partisipasi politik, salah satunya melalui kelompok kepentingan. Tujuan dari kelompok ini adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan-tujuannya.¹²

Orang atau kelompok yang berpartisipasi politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka dapat tersalurkan atau paling tidak diperhatikan. Sehingga, tentunya orang tersebut telah memiliki kesadaran politik.

Di negara-negara demokrasi umumnya memiliki partisipasi politik yang tinggi. Berbeda dengan negara yang memiliki partisipasi yang rendah biasanya diindikasikan negara yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian pada masalah-masalah kenegaraan.¹³ Menurut Nelson dan Samuel Huntington partisipasi politik tidak hanya mencakup segala kegiatan positif, tetapi juga melalui demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain merupakan partisipasi politik yang dianggap negatif.

¹¹ Misiem Budiardjo, *Demokrasi dan Ulu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 167

F. Hipotesis

Dari rumusan masalah dan penjelesan teori beserta konsep di atas dapat disimpulkan sementara:

1. Strategi politik yang dilakukan IM pada masa Gamal Abdul Nasser adalah melalui *low profile strategy*. Strategi ini dipilih setelah adanya tindakan-tindakan represif dari pemerintahan Nasser terhadap anggota-anggota IM. Sedangkan partisipasi politik yang dilakukan IM adalah partisipasi politik negatif, melalui demonstrasi.
2. Sementara, strategi politik yang dilakukan IM pada masa Husni Mubarak adalah strategi politik advokasi dimana IM mulai terjun ke pemerintahan dan melakukan partisipasi politik positif dengan turut serta dalam pemilu Majelis Rendah.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berkisar pada aktivitas gerakan perjuangan Ikhwanul Muslimin dalam melawan rezim otoritarianisme di Mesir dalam rentang waktu antara tahun 1948 dan 2012. Rentang masalah ini diambil dengan alasan:

1. Tahun-tahun tersebut adalah masa IM mengawali perjuangannya yakni pada tahun 1948 oleh Raja Farouk IM dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan sampai akhirnya menjadi organisasi bawah tanah pada masa Gamal Abdul Naser.

2. Tahun-tahun ini menjadi momentum berkembangnya organisasi

3. Tahun 1981-2011 adalah tahun-tahun dimana Husni Mubarak memiliki kekuasaan atas Mesir. Diantara tahun-tahun inilah IM untuk pertama kalinya masuk ke dalam parlemen Mesir.

H. Metode Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, mengingat ini adalah penelitian sosial yang selalu bergerak setiap waktu dapat mengalami perubahan. Unit analisa gerakan ini adalah gerakan Ikhwanul Muslimin itu sendiri yang selanjutnya disebut variabel dependen yakni unit analisa yang ingin dideskripsikan. Sedangkan unit-unit analisis yang hendak diamati dan ditelaah adalah pemerintahan Mesir rezim Gamal Abdul Nasser dan Husni Mubarak sebagai variabel independen.

Sumber yang didapatkan dalam penelitian ini yakni dari data-data sekunder terdiri dari arsip-arsip terkait, buku-buku, majalah, wawancara tokoh dan sebagai pendukung data-data dari internet. Buku yang menjadi rujukan utama adalah buku karangan Hasan Al Banna, yakni "*Risalah Pergerakan Hasan Al Banna*" jilid 1 dan 2. Sedangkan wawancara dengan tokoh terkait yakni dengan Bp. Cahyadi Takariawan penulis buku "*Al Ikhwan Al Muslimun: Bersama Mursid Am ka Dua*" sekaligus sebagai tokoh yang perhatian (concern) terhadap

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi berjudul “Komparasi Strategi Politik Ikhwanul Muslimin pada Masa Gamal Abdul Nasser (1948-1970) dan Husni Mubarak (1981-2011)”, secara garis besar penulis membagi kajian ini dalam lima bab. Bab I, sebagai latar belakang dan penjelasan teoritik untuk menjelaskan mengenai hipotesis dari penelitian ini. Kemudian dalam bab II penulis akan mendeskripsikan tentang Dinamika Struktur Sosial-Politik Mesir dan Ikhwanul Muslimin. Dimulai dari gambaran umum struktur sosial-politik Mesir, sejarah pendirian IM, pemikiran-pemikiran politiknya, konsolidasi dan dinamika pergerakannya.

Selanjutnya Bab III akan membahas tentang Strategi Politik IM Pada Masa Gamal Abdul Nasser, dan Bab IV membahas tentang Strategi Politik IM pada Masa Husni Mubarak. Di Bab terakhir akan ditutup dengan kesimpulan yang berusaha menyimpulkan sejumlah kajian yang sudah berhasil dibahas pada bab